

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nahdlatul Ulama (NU) adalah sebuah *jam'iyah* keagamaan terbesar yang ada di Indonesia. *Jam'iyah* ini adalah komunitas masyarakat Islam tradisional yang masih mempertahankan amalan-amalan mistisme hasil dari akulturasi dengan budaya-budaya lokal di Indonesia karena pengaruh dari sejarah panjang proses Islamisasi oleh Wali Sanga dalam mempertahankan aqidah *Ahlusunnah Wal Jama'ah*.¹

Oleh karena itu, lahirnya Nahdlatul Ulama ini tidak terlepas dari dua faktor yaitu ke-Islaman dan ke-Indonesiaan. Dalam artian Nahdlatul Ulama lahir sebagai wadah para ulama untuk mempertahankan amalan dan tradisi *ahli sunnah wal jamaah*, sekaligus dalam realitas ke-Indonesiaan bahwa Nahdlatul Ulama lahir ketika merespon politik etis yang diterapkan oleh pemerintahan Hindia-Belanda dalam rangka mewujudkan kemerdekaan Indonesia.

Nahdlatul Ulama yang sebetulnya sudah jelas adalah sebuah organisasi keagamaan, namun dalam perkembangan selanjutnya Nahdlatul Ulama tidak bisa mengelak kepada kondisi pada saat itu yang mengharuskan untuk melakukan gerakan-gerakan politik seperti apa yang telah dilakukan oleh Syarekat Islam.²

Soekarno pada Oktober 1956 berpidato dan mengancam apa yang disebut dengan “penyakit partai” dan mengusulkan sistem demokrasi terpimpin. Lalu pada 21 Februari Soekarno mengumumkan secara resmi konsepsinya yaitu diantaranya adalah pembentukan kabinet gotong royong yang beranggotakan empat partai besar yaitu PNI, Masyumi, PKI dan NU, serta pembentukan Dewan Nasional yang mengikutsertakan kelompok fungsional untuk menjadi penasehat pemerintah.

Demokrasi terpimpin ini adalah suatu fase politik di Indonesia yang digulirkan oleh tokoh nasional dan pemimpin pertama Republik Indonesia yaitu

¹ Aqidah *Ahli Sunnah Wal Jamaah* ini adalah sebuah pemahaman keagamaan yang tauhidnya mengambil pendapat imam Al-asy'ari dan imam Al-maturidi, fiqihnya mengambil pendapat dari empat mazhab fiqih yaitu imam syafi'i, imam maliki, imam hanafi dan imam hanbali. Sedangkan pemahaman tasawufnya menganut pada pemikiran imam Al-ghazali dan imam Al-bagdadi.

² Kang Young Soon, *Antara Tradisi dan Konflik: Kepolitikan Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: UI Press, 2008), hlm 95.

Presiden Soekarno.³ Demokrasi terpimpin ini adalah ciri khas bangsa Indonesia yaitu dalam musyawarah dan mencapai kata sepakat. Setiap keputusan-keputusan akan diambil melalui proses pertimbangan yang cermat dan bijak melalui seorang pemimpin. Model musyawarah mufakat inilah konsep demokrasi terpimpinnya Presiden Soekarno.⁴

Pada masa demokrasi terpimpin Soekarno membuat ideologi nasional yang bertujuan menyatukan semua kekuatan politik dan berharap warga negara memberikan dukungan kepadanya. Ideologi nasional tersebut adalah Manipol-Usdek dan NASAKOM (Nasionalis, Agamis, Komunis).

Maka dalam menerjemahkan konsep demokrasi terpimpin tersebut ke dalam politik, Presiden Soekarno segera membentuk kabinet Gotong Royong yang mewakili semua partai. Sehingga kabinet Gotong Royong ini adalah cerminan dari parlemen. Kabinet Gotong Royong ini juga akan lebih mampu menjalankan tugas-tugasnya dan meningkatkan kerukunan nasional dari pada kabinet sebelumnya yang jatuh bangun dengan diganggu oleh pihak oposisi.

Soekarno juga membentuk Dewan Nasional sebagai penerjemahan dari konsep demokrasi terpimpin. Dewan Nasional dibawah pimpinan Presiden Soekarno dapat memusyawarahkan garis-garis besar politik nasional. Dewan Nasional ini bukan suatu badan perwakilan dari partai melainkan wakil-wakil dari golongan fungsional seperti buruh, tani, cendikiawan, pengusaha, Islam, Protesta, Katolik, angkatan bersenjata, organisasi pemuda, organisasi wanita serta wakil-wakil daerah, dan ini adalah cerminan dari masyarakat keseluruhan.⁵

Adapun sikap Nahdlatul Ulama mengenai konsep demokrasi baru ala Presiden Soekarno pada tahun 1957, Nahdlatul Ulama yang pada masa itu sebagai salah satu partai politik yang mesti dipertimbangkan keberadaannya tidak menunjukkan sikap yang tegas dalam menolak atau menerima konsep demokrasi terpimpin pada awalnya. Berbeda dengan Masyumi dan Partai Katolik yang dengan jelas dan tegas menolak konsep demokrasi terpimpin.

³ Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm 12.

⁴ John D. Legge, *Soekarno, Sebuah Biografi Politik*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2001), hlm 325.

⁵ John D. Legge, *Soekarno, Sebuah Biografi Politik*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2001), hlm 327.

Namun pada bulan Maret 1957, Nahdlatul Ulama akhirnya menerima konsep demokrasi terpimpin Presiden Soekarno berdasarkan teori ushul Fiqh yaitu *dar' al mafasid muqaddamu 'ala jalb al-masalih* artinya adalah menghindari bahaya didahulukan dari pada mengambil mamfaat, karena kondisi pada saat itu Soekarno sangat dekat dengan komunis (PKI) sehingga mengkhawatirkan Indonesia menjadi negara komunis yang akan dijauhkan dengan agama.

Selain dari alasan ushul fiqh diatas, penerimaan NU terhadap demokrasi terpimpin juga mempunyai beberapa syarat yaitu bahwa Dewan Nasional hanya berfungsi sebagai penasehat dan tidak mempunyai konsekuensi politis, dan pembentukan Dewan Nasional ini harus dilakukan oleh kabinet bersama Kepala Negara.⁶

KH. Saifuddin Zuhri yang merupakan salah satu tokoh Nahdlatul Ulama memberikan dalil yang populer bagi kalangan pesantren dalam rangka mendukung konsep demokrasi terpimpin yang berbunyi “*Man laa yudraku kulluhu, laa yutraku ba'dahu*” (apa yang tidak dapat diraih seluruhnya, sebagian yang dapat diraih jangan dilepaskan).

Sedangkan menurut KH Idham Chalid yang merupakan ketua Tanfidziyyah⁷ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ketika memberikan pidato pertanggungjawaban pada kongres Nahdlatul Ulama yang ke-22 pada bulan Desember tahun 1959 di Jakarta menyatakan bahwa demokrasi terpimpin sesuai dengan nilai-nilai Islam, asalkan memuat dua hal yang saling melengkapi, *pertama* unsur musyawarah yang menghargai pimpinan dan *kedua* unsur pimpinan yang menghargai musyawarah.

Asas dari demokrasi terpimpin adalah Manipol-Usdek,dan Nasakom. Nahdlatul Ulama yang mendukung konsep demokrasi terpimpin disebutkan dalam buku M. Mansyur Amin bahwa bagi Nahdlatul Ulama pada saat itu yang penting

⁶ Choirul Anam, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama* (Solo: Jatayu Press, 1985), Cetakan Pertama, hlm 208.

⁷ Tanfidziyyah merupakan pelaksanaan keputusan-keputusan organisasi Nahdlatul Ulama dalam artian bahwa tanfidziyyah adalah pelaksana tugas harian dengan tugas utamanya adalah memimpin jalannya organisasi sehari-hari sesuai kebijakan yang ditentukan oleh pengurus Syuriah, melaksanakan program jam'iyah NU, membina dan mengawasi kegiatan perangkat jam'iyah yang ada dibawahnya dan lain-lain.

masuk dulu ke dalam perpolitikan Presiden Soekarno, jika dipandang memang kurang tepat maka keluar. Alasannya Nahdlatul Ulama masuk dalam dunia politik Presiden Soekarno masa demokrasi terpimpin adalah melakukan *amar ma'ruf nahyil mungkar* tidak bisa dari luar. Posisi Soekarno yang didukung oleh PKI dan Militer dirasa terlalu kuat, untuk itu mengikuti permainan adalah jalan yang paling realistis.

Pandangan dan tindakan politik yang diambil oleh Nahdlatul Ulama ini berbeda dengan Masyumi, Masyumi menolak demokrasi terpimpin ala Presiden Soekarno karena dianggap sistem demokrasi ini akan membawa kehancuran bagi bangsa Indonesia. Akibat dari tidak menerimanya demokrasi terpimpin maka Masyumi tidak mendapatkan kursi di DPR Gotong Royong dan di Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). Bahkan pada tahun 1960 Masyumi di bubarkan.⁸

Setelah Masyumi dibubarkan oleh Soekarno, Nahdlatul Ulama sangat berpeluang besar untuk berkiprah dalam politik nasional, Nahdlatul Ulama adalah satu-satunya partai Islam besar yang menjadi komponen NASAKOM, walaupun sebetulnya peran Nahdlatul Ulama dalam NASAKOM semakin menipis sama halnya dengan PNI, Karena pada saat itu pemerintahan Presiden Soekarno mempunyai dua kaki besar yaitu Militer dan PKI, maka kehidupan perpolitikan demokrasi terpimpin pemeran utamanya adalah ketiga komponen tersebut. Mesti begitu, Nahdlatul Ulama masih dapat menggunakan posisinya untuk membangun struktur organisasi dan membendung pergerakan PKI.

Ada beberapa alasan kuat mengapa Nahdlatul Ulama masuk dan mendukung konsep demokrasi terpimpinnya Presiden Soekarno. *Pertama* karena kedekatan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama dengan Presiden Soekarno, contohnya KH Saifuddin Zuhri, KH Wahab Chasbullah dan KH Idham Chali (tiga serangkai tokoh NU). Sedangkan KH Wahab Chasbullah dan KH Idham Chalid adalah aktor penentu politik Nahdlatul Ulama. Dalam kepengurusan NU, KH Wahab Chasbullah adalah

⁸ Muhammad Rijal Fadli, *Pergumulan Partai Politik Islam pada Masa Demokrasi Terpimpin: Masyumi Tumbang, NU Melenggang, PSII Bimbang*, Jurnal JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam), Volume 4, Nomor 1, Juli 2020, hlm 44.

Syuriah⁹ sedangkan KH Idham Chalid adalah Tanfidziyah¹⁰. Bahkan kedua tokoh tersebut mempunyai peranan yang besar untuk “ketuk palu” mengenai keputusan dan keikutsertaan Nahdlatul Ulama dalam kabinet Gotong Royong.

Kedua adalah sebuah alasan pragmatis yaitu keinginan Nahdlatul Ulama untuk menduduki jabatan Menteri Agama, dari jabatan ini orang-orang Nahdlatul Ulama akan dapat melakukan komunikasi dengan massanya dan meluaskan pengaruhnya ke seluruh negeri. *Ketiga* keterlibatan Nahdlatul Ulama dan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) disebabkan oleh kharisma Soekarno sendiri. Dari pihak PSII menilai bahwa hubungan presiden Soekarno dengan H.O.S Tjokroaminoto sebagai sebuah ikatan. Sedangkan bagi NU menggunakan pertimbangan agama dalam ketertarikannya terhadap Presiden Soekarno, oleh karena itu pada tahun 1953 Nahdlatul Ulama memberikan gelar kepada Presiden Soekarno sebagai bentuk dukungan moral dan teologis-politis yaitu dengan gelar *Waly Amri Bidhoruri wal Al-syawkah*. Gelar ini adalah karena dukungan dari hijrah dan ijtihadnya Presiden Soekarno dalam demokrasi terpimpin. Hijrah artinya pergantian dari Undang-Undang Dasar Sementara 1950 ke Undang-Undang Dasar 1945 sedangkan ijtihadnya adalah dengan Manipol-Usdek.¹¹

Adapun batasan penelitian pada pembahasan kali ini peneliti hanya akan membahas mengenai bagaimana Nahdlatul Ulama di elite politik atau di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau sebagai partai politik¹² bisa bertahan dalam kancah perpolitikan pada masa pemerintahan Soekarno, khususnya ketika Presiden Soekarno menerapkan konsep demoktasi terpimpin (1959-1965), Nahdlatul Ulama di PBNU atau Nahdlatul Ulama sebagai partai politik menerima konsep demokrasi terpimpin tersebut, sedangkan Masyumi menolak konsep demokrasi terpimpinnya Soekarno. Imbasnya Nahdlatul Ulama mendapatkan kedudukan dalam parlemen

⁹ Syuriah adalah sebuah badan musyawarah dalam pengambilan keputusan tertinggi dalam struktural kepengurusan NU. Dalam susunan kenegaraan, tugas syuriah sama halnya dengan legislatif.

¹⁰ Tanfidziyah adalah badan pelaksana harian NU yang menjalankan kebijakan dan keputusan yang telah ditetapkan oleh dewan Syuriah. Tahfidziyah adalah lembaga eksekutifnya.

¹¹ Muhammad Rijal Fadli, *Pergumulan Partai Politik Islam pada Masa Demokrasi Terpimpin: Masyumi Tumbang, NU Melenggang, PSII Bimbang*, Jurnal JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam), Volume 4, Nomor 1, Juli 2020, hlm 44.

¹² Bukan Nahdlatul Ulama sebagai individu atau jam'iyah yang sering disebut dengan nahdiyyin.

dan pemerintahan sedangkan Masyumi tidak mendapatkan apa-apa bahkan dibubarkan oleh Presiden Soekarno.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, muncul pertanyaan bagaimana alasan Nahdlatul Ulama dalam penerimaannya terhadap konsep demokrasi terpimpin, sedangkan ormas-ormas Islam yang lain seperti halnya Masyumi malah menolak konsep demokrasi yang ditawarkan presiden Soekarno. Terjadinya pro-kontra diantara dua kekuatan politik Islam Indonesia dalam merespon politik Soekarno menarik untuk dilihat.

Politik Nahdlatul Ulama yang bersifat akomodatif dan cenderung memilih bekerjasama dengan pemerintah dianggap oleh lawan politiknya sebagai ormas atau partai politik yang oportunistik. Padahal sikap Nahdlatul Ulama yang luwes dan akomodatif tersebut berdasarkan pedoman politik Sunni yang dipegangnya. Termasuk sikap NU pada masa penerapan konsep demokrasi terpimpin yang hanya berjalan selama enam tahun yaitu dari tahun 1959 sampai 1965. Nahdlatul Ulama memilih untuk bergabung dalam NASAKOM (Nasionalis, Agamis dan Komunis), Nasionalis diwakili oleh PNI, Komunis adalah dari PKI dan Agamis hanya diwakili oleh Nahdlatul Ulama.

Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana Nahdlatul Ulama memainkan peranannya didalam NASAKOM diantara nasionalis dan komunis, bahkan PNI sendiri tidak memiliki kekuatan apa-apa karena Soekarno mempunyai dua kaki besar yaitu PKI dan Militer, bagaimana posisi Nahdlatul Ulama dan bagaimana bentuk dukungan Nahdlatul Ulama terhadap presiden Soekarno.

Untuk menjawab pertanyaan diatas, dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep demokrasi terpimpin?
2. Bagaimana alasan Nahdlatul Ulama dalam menerima konsep demokrasi terpimpin (1959-1965)?
3. Bagaimana dukungan Nahdlatul Ulama terhadap Kepemimpinan Presiden Soekarno selama demokrasi terpimpin (1959-1965)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini memiliki tujuan untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah yang telah diuraikan sebagai berikut:

1. Tujuan Praktis

Penelitian ini secara praktis, ditujukan sebagai syarat kelulusan pascasarjana untuk mendapatkan gelar Magister Humaniora pada program studi Sejarah Peradaban Islam di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

2. Tujuan Akademik

Secara keilmuan penulis ingin memaparkan bagaimana latar belakang Presiden Soekarno menerapkan konsep demokrasi terpimpin yang selanjutnya konsep demokrasi ini diterima oleh Nahdlatul Ulama, sehingga Nahdlatul Ulama terus menggalangkan dukungan-dukungannya terhadap kepemimpinan Presiden Soekarno selama rentang tahun 1959 sampai 1965. Selain itu penulis juga mencoba menganalisa beberapa mengenai sejarah dukungan Nahdlatul Ulama terhadap kepemimpinan Soekarno, seperti:

1. Mengetahui konsep demokrasi terpimpin.
2. Mengetahui alasan Nahdlatul Ulama dalam menerima konsep demokrasi terpimpin (1959-1965).
3. Mengetahui dukungan Nahdlatul Ulama terhadap Kepemimpinan Presiden Soekarno selama demokrasi terpimpin (1959-1965).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu memetakan sejarah politik Nahdlatul Ulama dalam menerima konsep demokrasi terpimpin Presiden Soekarno yang kemudian Nahdlatul Ulama bermain di pentas politik nasional. Penelitian ini secara praktis dapat menjelaskan bagaimana sikap Nahdlatul Ulama yang memilih bekerjasama dan berkoalisi dengan pemerintah, sikap Nahdlatul Ulama ini berdasarkan pemikiran politik agama.

2. Manfaat Akademik

Secara akademik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan mamfaat untuk memberikan pemahaman mengenai dukungan Nahdlatul Ulama terhadap kepemimpinan Presiden Soekarno pada tahun 1959 sampai 1965. Selain itu peneliti dalam hal ini mengharapkan penelitian ini dapat berguna dalam memahami sejarah seperti:

1. Mengetahui konsep demokrasi terpimpin.
2. Mengetahui alasan Nahdlatul Ulama dalam menerima konsep demokrasi terpimpin (1959-1965).
3. Mengetahui dukungan Nahdlatul Ulama terhadap Kepemimpinan Presiden Soekarno selama demokrasi terpimpin (1959-1965).

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka sangat diperlukan untuk meminimalisir kesamaan dalam hal isi ataupun bentuk plagiarisme lainnya. Penulis melakukan penelusuran sumber yang terkait dengan apa yang akan dibahas oleh penulis. Disisi lain, penulis juga melakukan *riview* terhadap penelitian sejenis sebagai bahan pembanding, juga sebagai bahan informasi dari masalah yang akan diteliti untuk kemudian dikembangkan. Adapun penulis menemukan beberapa penelitian sejenis diantaranya berupa:

Tesis

Pertama, Tesis dengan judul *Nahdlatul Ulama dalam Era Demokrasi Terpimpin* di tulis oleh Muhaimin dari IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 1991. Tesis ini berisi sejarah NU pada masa demokrasi terpimpin. Perbedaan dengan penelitian yang penulis tulis adalah penulis fokus melihat dukungan Nahdlatul Ulama terhadap kepemimpinan Presiden Soekarno pada tahun 1959-1965. Walaupun sama-sama melihat NU pada masa demokrasi terpimpin namun penulis menegaskan bahwa penulis fokus pada dukungan-dukungan NU terhadap presiden Soekarno.

Kedua, Tesis dengan judul *Peran Nahdlatul Ulama dalam Politik Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin tahun 1959-1965* ditulis oleh Klavi Novia Devi dari Universitas Jember. Tesis ini berisi mengenai peran Nahdlatul Ulama yang

pada saat masa demokrasi terpimpin sebagai partai yang cukup besar banyak bekerjasama dengan Angkatan Darat (AD) karena kesamaan untuk membendung pengaruh PKI. Berbeda dengan fokus penelitian yang akan penulis tulis adalah pada dukungan Nahdlatul Ulama terhadap kepemimpinan Presiden Soekarno tahun 1959-1965 (masa demokrasi terpimpin), walaupun sama-sama melihat NU pada masa demokrasi terpimpin namun fokus penelitiannya berbeda.

Ketiga, Tesis dengan judul *Partai Nahdlatul Ulama dalam Percaturan Politik Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin tahun 1959-1965* ditulis oleh Yuver Kusnoto dari Universitas Jember tahun 2007. Tesis ini berisi pembahasan dari sejarah Nahdlatul Ulama sebagai partai politik sampai kepada pembahasan peran partai politik NU pada masa demokrasi terpimpin seperti peran NU bersama dengan pemerintah menumpas beberapa pemberontakan yang dianggap mengganggu keamanan nasional, seperti perlawanan di daerah terhadap PKI. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah fokus pada dukungan-dukungan Nahdlatul Ulama sendiri pada kepemimpinan Presiden Soekarno pada tahun 1959-1965 (masa demokrasi terpimpin).

Keempat, Tesis dengan judul *Kepemimpinan di dalam NU pada masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965* ditulis oleh Bondan Kunumoyoso dari Universitas Indonesia. Tesis ini berisi mengenai sejarah kepemimpinan dalam Nahdlatul Ulama yang selalu dipegang oleh para kyai yang pada masa demokrasi terpimpin di dalam internal PBNU saat itu sangat akomodatif dengan presiden Soekarno, NU pada saat itu adalah satu-satunya partai politik (parpol) Islam yang mewakili unsur agama dalam wadah NASAKOM yang berjajar dengan komunis dari PKI, namun disisi lain NU dengan Angkatan Darat bekerjasama untuk membendung pengaruh komunis dikalangan masyarakat. Perbedaan tesis ini dengan penelitian yang akan penulis bahas adalah penulis hanya fokus pada dukungan-dukungan Nahdlatul Ulama terhadap kepemimpinan Presiden Soekarno tahun 1959-1965.

Kelima, Tesis dengan judul *Kebijakan Soekarno terhadap Partai Politik Islam pada masa Demokrasi Terpimpin* yang ditulis oleh Syan Daya Mauryandaswara dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tesis ini berisi mengenai

NU, Perti dan PSII adalah parpol Islam yang bertahan pada masa demokrasi terpimpin karena menerima gagasan demokrasi terpimpin serta kebijakan-kebijakan Presiden Soekarno terhadap parpol-parpol Islam pada masa demokrasi terpimpin. Perbedaan dengan penelitian yang penulis adalah penulis fokus pada dukungan Nahdlatul Ulama terhadap kepemimpinan Presiden Soekarno tahun 1959-1965.

Artikel Jurnal

Pertama, kajian yang berkaitan dengan apa yang peneliti teliti tentang dukungan politik NU terhadap kepemimpinan Soekarno, yaitu artikel yang telah dipublish dalam Jurnal Herodotus: Jurnal Pendidikan IPS yang berjudul *Nahdlatul Ulama Pada Masa Pemerintahan Presiden Soekarno (1945-1966)* yang ditulis oleh A. Hidayat. Isi dari artikel ini adalah berisi bagaimana kebijakan politik Presiden Soekarno terhadap kekuatan politik Islam di Indonesia serta bagaimana sikap politik NU pada masa akhir pemerintahan Soekarno. Perbedaan artikel ini dengan penelitian penulis ada pada rentang waktu, jika A. Hidayat melihat NU dalam tahun 1945 sampai 1966 maka penulis melihat NU masa kepemimpinan Presiden Soekarno sejak tahun 1959 sampai 1965 dan fokus pada dukungan NU sendiri kepada presiden Soekarno masa demokrasi terpimpin.

Kedua, Sebuah artikel yang diterbitkan oleh Jurnal JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam) Volume 4 Nomor 1 Juli 2020 yang berjudul Pergumulan Partai Politik Islam pada masa Demokrasi Terpimpin: Masyumi Tumbang, NU Melenggang, PSII Bimbang yang ditulis oleh Muhammad Rijal Fadli. Isi dari artikel Jurnal adalah bagaimana respon umat Islam yang diwakili oleh berbagai partai politik Islam dalam menyikapi demokrasi terpinpinnya Soekarno yang menimbulkan dualisme, dalam artian terjadi pro dan kontra. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis fokus pada Nahdlatul Ulama yang mendukung konsep demokrasi terpimpin dari Presiden Soekarno tahun 1959 sampai 1965 dengan melihat dukungan-dukungan NU terhadap Soekarno.

Ketiga, sebuah artikel dengan judul Tinjauan Historis Pengangkatan Soekarno Sebagai *Waliyy Al-Amr Al-Daruri Bi Al-Syaukah oleh NU* yang ditulis oleh Desri Juliandri, Maskun dan Syaiful M dari FKIP Unila yang dipublish dalam

salah satu Jurnal. Isi dari artikel ini adalah proses, tujuan dan dampak pengangkatan Presiden Soekarno sebagai *Waliyy Al-Amr Al-Daruri Bi Al-Syaukah* oleh Nahdlatul Ulama pada tahun 1954 melalui acara Konferensi Alim Ulama pertama pada tanggal 12-13 Mei 1952 di Tugu, lalu Konferensi ke dua yang dilakukan oleh Menteri Agama dengan para alim ulama pada tanggal 4-5 Mei 1953 di Bogor dan akhirnya dipertegas pada tanggal 3-6 Maret 1954 di Cipanas. Tujuan dari pengangkatan Presiden Soekarno adalah agar masyarakat Indonesia terutama umat Islam Indonesia mentaati perintah Presiden Soekarno sesuai dengan *syariat* Islam, artinya Nahdlatul Ulama memberika legitimasi keagamaan kepada Presiden Soekarno sebagai pemimpin. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah jelas bahwa penulis fokus di dukungan Nahdlatul Ulama terhadap Soekarno masa demokrasi terpimpin atau dalam rentang tahun 1959 sampai 1965.

Keempat, artikel dengan judul *Demokrasi Terpimpin dalam Pemikiran dan Praktik Politik* ditulis oleh Anwar Ilmar pada Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA'45 Jakarta, berisi mengenai konsep demokrasi terpimpin dari pemikiran Soekarno, namun pada akhirnya karena konfigurasi politik sistem demokrasi terpimpin tersebut tidak bisa lagi menyeimbangi kekuatan-kekuatan politik yang ada. Perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti dengan artikel ini adalah penulis fokus pada dukungan Nahdlatul Ulama di PBNU atau elite NU terhadap presiden Soekarno masa demokrasi terpimpin (1959-1965).

Kelima, artikel dengan judul *Legalitas Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Pengaruhnya bagi Perkembangan Demokrasi di Indonesia* yang ditulis oleh Danang Risdiarto dari Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam Jurnal Legislasi Indonesia Volume 15 No. 01 edisi Maret 2018. Artikel ini berisi mengenai dekrit presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang menandakan diberlakukannya demokrasi terpimpin dan pembubaran Konstituante serta sistem demokrasi parlementer, sebagian para ahli ada yang mengatakan bahwa dekrit tersebut tidak konstitusional dan sebagian yang lain mengatakan bahwa dasar hukum dekrit tersebut adalah *Staatnoodrecht* yang menunjukkan keadaan darurat negara. Berbeda dengan fokus penelitian yang penulis akan bahas adalah terhadap dukungan Nahdlatul Ulama terhadap kepemimpinan Presiden Soekarno tahun 1959-1965.

Keenam artikel dengan judul *Masyumi dalam Kontestasi Politik Orde Lama* ditulis oleh Abdul Rahman dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makasar. Artikel ini berisi mengenai kiprah Masyumi pada masa orde lama Presiden Soekarno, berbeda dengan fokus penelitian penulis adalah di dukungan Nahdlatul Ulama terhadap Presiden Soekarno masa demokrasi terpimpin (1959-1965).

Ketujuh artikel dengan judul *Redupnya Peran Partai Politik Islam di masa Demokrasi Terpimpin (Studi Kasus Pembubaran Masyumi oleh Presiden Soekarno)*, artikel ini ditulis oleh Alim Bathoro yang telah dipublish di Jurnal Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan volume 2 No. 02 edisi Februari 2018, berisi mengenai sejarah dan peran Masyumi pada masa Presiden Soekarno sampai alasan pembubaran Masyumi. Jelas perbedaan dengan penelitian penulis adalah fokus pada dukungan Nahdlatul Ulama terhadap kepemimpinan Presiden Soekarno tahun 1959-1965.

Kedelapan artikel dengan judul *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Partai Masyumi (1945-1960)*, artikel ini ditulis oleh Insan Fahmi Siregar dari Universitas Negeri Semarang dalam sebuah Jurnal bernama *Thaqafiyat* volume 14 No. 1 tahun 2013, berisi mengenai sejarah Masyumi yang didalamnya memuat Masyumi pada masa pergolakan politik atau pada masa Masyumi menolak konsep demokrasi terpimpin Presiden Soekarno sampai dengan dibubarkannya Masyumi oleh Soekarno. Perbedaan dengan penelitian penulis jelas adalah penulis fokus pada dukungan NU terhadap kepemimpinan Presiden Soekarno tahun 1959-1965.

Buku

Selain beberapa tesis dan artikel ilmiah yang telah dijelaskan sebelumnya, adapun buku-buku yang memiliki kesamaan tema yaitu membahas mengenai Nahdlatul Ulama pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno adalah sebagai berikut:

Buku *pertama* adalah buku Soekarno dan NU, adalah buku yang ditulis oleh Zainal Abidin Amir dan Imam Anshori Shaleh. Dalam buku ini, terdapat dua bab yang memiliki kedekatan dengan tesis yang penulis teliti. Kedekatan pembahasan yang membahas NU dan Soekarno terdapat pada bab ke-empat, dalam bab tersebut dijelaskan tentang Soekarno dan NU, mulai dari Soekarno dan NU era pra

kemerdekaan. Selanjutnya dibahas pula mengenai titik temu Soekarno dan NU pada bab ke-lima. Dalam buku ini dijelaskan bahwa ada kedekatan antara NU dan presiden Soekarno, dan dijelaskan pula mengenai titik temunya konsep nasionalisme Soekarno dan nasionalisme ala NU.

Buku *kedua* berjudul *Ijtihad Kebangsaan Soekarno dan NU* ditulis oleh Imam Muhlis. Kedekatan isi buku dengan penelitian penulis ada pada bab keempat dengan sub judul Titik Temu Soekarno dan NU mulai dari pembahasan mengenai NU membela Soekarno, Soekarno cinta NU sampai dengan Memahami NU dan Soekarno: menjadi Indonesia.

Buku *ketiga*, *Ijtihad Politik Ulama, sejarah NU 1952-1967*, buku ini ditulis oleh Greg Fealy. Kedekatan pembahasan isi buku ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah terdapat pada bab ke-empat. Pada bab tersebut berjudul Politik Akomodasi (1957-1961), dalam bab tersebut dijelaskan mengenai bagaimana sejarah NU menuju demokrasi terpimpin sampai pada keputusan NU untuk menerima dan bekerjasama dengan Soekarno pada masa demokrasi terpimpin.

Buku *keempat* adalah buku dengan judul *NU Vis-à-Vis Negara* karya Andree Feillard yang diterbitkan oleh LKiS. Buku ini berisi sejarah Nahdlatul Ulama dari keterlibatan NU sebagai partai politik sampai kepada kembalinya NU ke khittah 1926. Kedekatan pembahasan isi buku dengan penelitian yang akan diteliti ada pada bagian dua dengan judul Nahdlatul Ulama Awal Orde Baru dari Aliansi hingga Perpecahan (1965-1973).

Buku *kelima* adalah buku dengan judul *NU Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru* yang ditulis oleh Martin Van Bruinessen dan diterbitkan oleh LKiS. Buku ini berisi sejarah panjang dan sepak terjang Nahdlatul Ulama. Buku ini berguna bagi peneliti sebagai bacaan awal khususnya NU ketika masa-masa sulit periode demokrasi terpimpin.

Buku *keenam* adalah buku dengan judul *Antara Tradisi dan Konflik: Kepolitikan Nahdlatul Ulama* yang ditulis oleh Kang Young Soon. Kedekatan isi buku ini dengan penelitian yang akan penulis tulis adalah dari bab dua dengan sub judul Sejarah Organisasi Nahdlatul Ulama khususnya pada pembahasan memasuki

wilayah politik mulai dari masa demokrasi liberal (1945-1959), masa demokrasi terpimpin (1959-1967) sampai dengan masa orde baru.

Buku *ketujuh* dengan judul *Nahdlatul Ulama dan Pancasila* karya Einar M. Sitompul. Kedekatan isi buku ini dengan tema penelitian yang penulis tulis adalah ada pada bab keempat dengan sub judul Nahdlatul Ulama Menjadi Partai Politik dari PNU masa presiden Soekarno (orde lama) sampai menjadi PPP masa presiden Soeharto (orde baru).

Buku *kedelapan* dengan judul *Partai Islam di Pentas Nasional* ditulis oleh Deliar Noer. Kedekatan isi buku dengan penelitian penulis ada pada bagian ketujuh dengan sub judul Demokrasi Terpimpin (1957-1965) mulai dari gagasan demokrasi terpimpin, bubarnya Masyumi sampai pada NU, PSII dan Perti dengan politik penyesuaian diri.

Buku *kesembilan* adalah dengan judul *Pertumbuhan dan Perkembangan NU* yang ditulis oleh Chairul Anam. Kedekatan isi buku ini dengan penelitian penulis ada pada judul Nahdlatul Ulama menjadi Partai Politik khususnya pada pembahasan masa pergolakan dari tahun 1959 sampai 1968.

Buku *kesepuluh*, Napak Tilas Pengabdian Idham Chalid Tanggung Jawab Politik NU dalam Sejarah, editor buku ini adalah Arief Mudatsir Mandan. Buku ini membahas mengenai biografi KH Idham Chalid, KH Idham Chalid pada masa demokrasi terpimpin adalah sebagai ketua PBNU dan beliau salah satu orang NU yang menerima konsep demokrasi terpimpin. Kedekatan isi buku ini dengan penelitian yang akan diteliti ada pada bab ke-tujuh. Bab tersebut berjudul Bahtera terus belayar ditengah badai: posisi NU sejak demokrasi terpimpin hingga kembali ke khittah 1926 (5 Juli 1959-1984). Pada bab ini dibahas mengenai bagaimana perjuangan NU dalam Konstituante dan bagaimana keterlibatan NU dalam demokrasi terpimpin. Ini bisa membantu penulis dalam menganalisis bagaimana bentuk dukungan NU terhadap kepemimpinan Soekarno dari tahun 1959 sampai 1965.

Buku *Kesebelas* yaitu Agama dan Pendidikan Demokrasi Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang ditulis oleh Fuad Fachruddin. Buku ini membahas mengenai NU dan Muhammadiyah dalam mengopseptualisasikan

dan menerapkan pendidikan untuk kewarganeraan demokratis, mengukur kesamaan dan perbedaan konseptualisasi dan operasionalisasi pendidikan kewarganeraan demokratis dalam dan diantara kedua organisasi tersebut, artinya berisi mengenai konseptualisasi dan operasionalisasi kedua organisasi Islam Indonesia tersebut dalam demokrasi dan masyarakat demokratis, berisi juga mengenai nilai-nilai dan prinsip NU dan Muhammadiyah dalam konsep demokrasi juga dalam pengambilan keputusan dan kegiatan dalam fungsi-fungsi yang ada dalam organisasi. Kedekatan isi buku ini dengan penelitian yang akan diteliti ada pada bab 3 dengan judul bab masyarakat madani dan perkembangan demokrasi khususnya pada sub bab NU dan orde lama Soekarno. Pada sub bab tersebut menjelaskan secara singkat keterlibatan dan dukungan NU di era orde lama Soekarno.

F. Landasan Teori

Dalam penelitian sejarah diperlukan analisa sejarah yang menyediakan sebuah kerangka pemikiran yang merangkum suatu konsep serta teori. Adanya konsep serta teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian yang peneliti bahas memerlukan beberapa pendekatan untuk mendapatkan analisis yang baik. Untuk itu tesis menggunakan teori hermeneutika yang dipopulerkan oleh Paul Ricoeur.

Paul Ricoeur sendiri dilahirkan di Valance, sebuah daerah di Perancis Selatan pada tahun 1913. Ricoeur memfokuskan penelitian hermeneutikanya pada teks. Menurutnya, teks adalah bersifat otonom, ia tidak bergantung pada maksud pengarang, pada situasi historis karya atau buku dimana teks itu berada. Karena teks merupakan penghubung bahasa isyarat dan simbol-simbol yang dapat membatasi ruang lingkup hermeneutika, karena budaya oral (ucapan) dapat dipersempit atau diperluas, maka jika hermeneutika diterapkan pada suatu teks, maka sifat hermeneutika akan berubah sesuai dengan keadaan teks itu sendiri. Hermeneutika tidak lagi meneliti makna tersembunyi dibalik teks, tetapi hermeneutika lebih menekankan pada penyelidikan makna yang bersifat objektif.¹³

¹³ Asep Ahmad Hidayat, *Filsafat Bahasa*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, Cetakan keempat 2016), hlm 158-159.

Maksud dari Paul Ricoeur adalah ingin mendefinisikan hermeneutika yang tidak hanya sebagai interpretasi terhadap simbol-simbol, tetapi lebih dari itu hermeneutika menurut Ricoeur adalah sebagai teori pengoperasian pemahaman dalam hubungannya dengan interpretasi terhadap teks. Adapun tugas hermeneutika menurut Paul Ricoeur adalah mencari dinamika internal yang mengatur struktural kerja didalam sebuah teks dan mencari daya yang dimiliki kerja teks itu untuk memproyeksikan diri ke luar dan memungkinkan “hal” nya teks itu muncul kepermukaan.

Menurut Ricoeur manusia pada dasarnya adalah bahasa, sedangkan bahasa adalah syarat utama bagi pengalaman manusia. Lewat bahasa manusia bersimbolis melalui kata-kata, manusia mengungkapkan seluruh batinnya melalui kata-kata. Kata-kata itulah menurut Ricoeur merupakan simbol-simbol juga, karena ia melukiskan makna yang lain yang sifatnya tidak langsung, tidak begitu penting serta figuratif dan hanya dapat dimengerti melalui simbol-simbol tersebut. Dengan demikian, simbol-simbol dan interpretasi merupakan konsep-konsep yang mempunyai pluralitas makna yang terkandung didalam simbol-simbol ataupun kata-kata.¹⁴

Tujuan dari hermeneutika lanjut Ricoeur adalah untuk menghilangkan misteri yang terdapat dalam sebuah simbol dengan cara membuka selubung daya-daya yang belum diketahui dan tersembunyi didalam simbol-simbol tersebut, seperti dalam kata-kata. Hal ini karena kata-kata merupakan alat untuk mengungkapkan pikiran simbolis tentang dunia.

Lanjut Ricoeur menerangkan mengenai tiga langkah pemahaman, langkah pertama adalah langkah simbolik atau pemahaman dari simbol ke simbol. Langkah kedua adalah pemahaman makna oleh simbol serta penggantian yang cermat atas makna. Langkah ketiga adalah langkah yang benar-benar filosofis, yaitu berfikir dengan menggunakan simbol sebagai titik tolaknya.¹⁵

¹⁴ Asep Ahmad Hidayat, *Filsafat Bahasa*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, Cetakan keempat 2016), hlm 160.

¹⁵ Asep Ahmad Hidayat, *Filsafat Bahasa*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, Cetakan keempat 2016), hlm 161.

Mengenai hermeneutika ini Ricoeur telah dituangkan dalam karyanya yang berjudul *La Metaphore vive* (Metapora yang hidup), Ricoeur melihat bahwa metapora tidak hanya dari sudut “kata” melainkan dari sudut “pernyataan” dan bahkan lebih jauh dari sudut “diskursus” atau keseluruhan wacana. Menurutnya jika metapora hanya dilihat dari sudut “kata” maka kita tidak akan pernah melihat nilai produktif dan inventif dari metapora. Kita hanya dapat berkuat pada segi deviasinya saja.

Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Ricoeur mula-mula beralih dari kata-metafora menuju pernyataan-metafora; yaitu dari makna kata berjalan ke arah semantika, makna kalimat. Namun jalan inipun ternyata tidak mampu mengeluarkan nilai metafora secara sepenuhnya. Itulah sebabnya Ricoeur beralih ke arah pemikiran yang meyakini bahwa nilai metafora yang sebenarnya baru akan tampil bila ia dianggap sebagai klaim yang menunjuk pada kebenaran dan realitas. Artinya bahwa tidaklah cukup kita menghubungkan metafora pada soal makna belaka, melainkan dianggap perlu menghubungkannya pada soal referensi tentang metafora itu sendiri. Karena kita perlu menghubungkannya dengan referensi, maka dengan sendirinya “metafora” tidak dilihat dari sudut kata saja, tapi mesti dilihat dari sudut diskursus atau keseluruhan wacana yang terkandung didalamnya.¹⁶

Yang dimaksud dengan referensi menurut Ricoeur adalah berbeda dengan konsep referensi dari Frage. Menurut Frage bahwa referensi terhadap kebenaran hanya dapat diterapkan pada pernyataan-pernyataan ilmiah dan tidak pada pernyataan-pernyataan sastra. Referensi baginya adalah sama dengan denotasi. Sastra adalah wacana yang hanya mengandung konotasi (kiasan), tidak ada padanya denotasi. Karenanya sastra hanya berkaitan dengan “sense” (makna), tidak memiliki kaitan dengan *reference* (acuan). Pendapat seperti ini ditentang oleh Ricoeur dengan mengatakan bahwa dalam wacana sastra sebetulnya adalah struktur karya itu, sedangkan referensinya (acuan) adalah “dunia” yang ditampilkan oleh karya itu. Mengatur transisi dari struktur karya sastra ke “dunia” yang ditampilkan merupakan kerja hermeneutika. Dengan begitu manafsirkan suatu karya sastra

¹⁶ Asep Ahmad Hidayat, *Filsafat Bahasa*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, Cetakan keempat 2016), hlm 161.

berarti memadang dunia yang diacu oleh karya itu, melalui bentuk penataan, genre (kodifikasi khas) dan gaya penulisannya. Jelasnya karya sastra melalui strukturnya itu, menampilkan sebuah dunia acuannya adalah dengan cara menyisihkan acuan denotatif. Atau seperti dikatakan I. Bambang Sugiharto dalam bukunya *Postmodernisme* walaupun istilah “denotatif” masih mau digunakan, maka dalam karya sastra acuan itu dua tahap. Langkah yang dilakukan adalah dengan cara menyisihkan denotasi yang pertama untuk denotasi yang baru.¹⁷

Cara berfikir seperti itu, jika diterapkan pada bahasa metafora, maka seperti halnya suatu metafora baru akan terasa bila dihadapkan pada arti literal atau harfiahnya, maka acuan metafora pun baru tampak manakala ia dihadapkan pada acuan literalnya.

Kemudian cara kerjanya, acuan (*referensi*) itu dalam pikiran Ricoeur bergerak dari dua arah, yaitu dari simbol menuju benda atau realita atau dari bendanya menuju simbol. Arah acuan yang kedua ini bagi Ricoeur tidak kalah pentingnya dengan arah yang pertama. Keduanya merujuk pada makna yang dikandung. Misalnya, kita menemukan sebuah tulisan yang tergantung disebuah dinding dengan tampilan leteralnya (harfiahnya) menampilkan warna abu-abu atau gelap. Warna abu-abu dilihat dari sudut metafora secara leteral mengandung makna sedih. Dengan cara itu maka lukisan tersebut di satu pihak berkaitan dengan fakta, yaitu suatu keadaan yang dinobatkan dengan memberi predikat tertentu atau bukan “sesuatu yang berarti” dan dilain pihak lukisan tersebut berkaitan dengan “figur” (abu-abu = sedih). Berkaitan dengan hal ini, maka “figur” juga harus dimengerti bukan sekedar ornamen, melainkan sebagai penggunaan predikat dengan denotasi terbalik, yaitu bukannya simbol memberi arti pada benda (realita), melainkan benda (realita) itu yang mengarahkan arti tertentu yang dimilikinya pada simbol atau label yang ada dalam lukisan tersebut. Begitu seharusnya dalam mengungkapkan metafora.¹⁸

¹⁷ Asep Ahmad Hidayat, *Filsafat Bahasa*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, Cetakan keempat 2016), hlm 161-162.

¹⁸ Asep Ahmad Hidayat, *Filsafat Bahasa*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, Cetakan keempat 2016), hlm 162-163.

Akan tetapi, metafora pun tidak hanya mengandung “figur” belaka, dalam pengertian tidak hanya mengandung pemindahan sebuah predikat dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Metaforapun bisa merupakan pemindahan sebuah “wilayah” secara keseluruhan. Jadi, misalnya bukan sekedar predikat “merah” atau “orange”, “kuning” melainkan wilayah secara keseluruhan, yaitu warna yang dipindahkan.

Dengan berdasarkan konsep “acuan” itu, sebagai konsekuensinya Ricoeur harus menerima pandangan yang berpendapat bahwa bahasa itu bersifat referensial. Bahasa katanya menampilkan “cara berada hal-hal justru berkat ivonasi semantik”.

Seperti dimaklumi, bahwa dalam pendekatan referensial, makna diartikan sebagai simbol yang berada dalam kesadaran manusia untuk menunjuk dunia luar. Sebagai simbol atau label, makna itu hadir karena adanya kesadaran pengamatan terhadap fakta dan penarikan kesimpulan yang keseluruhannya berlangsung secara subjektif. Kata, pohon misalnya, berdasarkan kesadaran pengamatan dan penarikan kesimpulan, bukan hanya menunjuk jenis-jenis tumbuh-tumbuhan, melainkan memperoleh julukan sebagai “ciptaan”, “hidup” dan “fana”. Karena itu kata “pohon” dalam baris puisi Goenawan Mohammad disebutkan*berbagai dingin diluar jendela mengekalkan yang esok mungkin tak ada.*

Dari uraian diatas maka kita akan mengetahui kesamaan pikiran antara Ricoeur dan Goltob Frege, mereka berdua pada dasarnya mengakui adanya hubungan referensial antara makna simbolis (bahasa) dengan benda atau kenyataan diluar dirinya. Jika kita sepakat dengan Ricoeur maka mau tidak mau kita harus mengakui bahwa setiap makna simbolis yang disimbolkan senantiasa memiliki acuan, baik secara denotasi maupun metaforis.¹⁹

Nahdlatul Ulama adalah sebuah organisasi keagamaan, sekaligus sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia yang berdiri sejak 31 Januari 1926 di Surabaya. Organisasi keagamaan ini bergerak pada bidang keagamaan, pendidikan, sosial dan ekonomi. Tapi diawal kelahirannya serta perkembangan awalnya, Nahdlatul Ulama masuk pada ranah politik, bahkan sempat menjadi partai politik

¹⁹ Asep Ahmad Hidayat, *Filsafat Bahasa*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, Cetakan keempat 2016), hlm 163.

yang juga turut menentukan kebijakan-kebijakan pemerintah. Khususnya Nahdlatul Ulama ketika lebih memilih bekerjasama dan menerima konsep demokrasi terpimpin sejak tahun 1959. Jadi Nahdlatul Ulama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ketika Nahdlatul Ulama menerima konsep demokrasi terpimpin dan terus memberikan dukungan-dukungan terhadap kepemimpinan Presiden Soekarno.

Teori hermeneutika Paul Ricoeur diatas mengemukakan bahwa kajian hermeneutikanya fokus pada teks, maka untuk melihat NU baik alasan penerimaan terhadap demokrasi terpimpin Presiden Soekarno atau bentuk dukungan NU terhadapnya akan dilihat melalui kajian hermeneutika yang bersumber pada teks.

Ricoeur membagi dua mengenai identifikasi hermeneutikanya, yaitu *pertama* interpretasi terhadap simbol-simbol, disini kita menyetujui bahwa kata-kata termasuk pada simbol dan simbol melukiskan makna lain yang sifatnya tidak langsung. Interpretasi terhadap simbol contohnya adalah ketika KH Wahab Chasbullah mengatakan bahwa NU harus masuk dulu ke dalam DPR GR, itu artinya secara tidak langsung bahwa KH Wahab Chasbullah menerima konsep demokrasi terpimpin Presiden Soekarno.

Adapun yang *kedua* mengenai identifikasi hermeneutika Ricoeur yaitu pengoprasian pemahaman dalam hubungannya dengan interpretasi terhadap teks. Contohnya adalah teks Haluan Politik Negara yang ditulis oleh KH Idham Chalid dalam majalah Api Islam, didalam teks tersebut menggambarkan begitu sangat mendukungnya KH Idham Chalid mengenai konsep demokrasi terpimpin dan konsep nasakom yang sesuai dengan ajaran Islam, hal ini adalah termasuk pada dukungan ide dari Nahdlatul Ulama sendiri terhadap kepemimpinan Presiden Soekarno.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sejarah untuk mengetahui bagaimana peristiwa maupun kejadian di masa lalu. Semua itu dirangkai dengan sistematis dan objektif. Cara yang peneliti lakukan yaitu, mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi serta mensistensikan bukti-bukti agar mendapatkan fakta dan kesimpulan yang kuat. Pendekatan dalam penulisan ini adalah metode sejarah

adalah metode yang berpangkal pada peristiwa-peristiwa sosial yang pada hakikatnya tidak bersifat eksak.²⁰

Peneliti merasa perlu melakukan penelitian secara langsung agar mendapatkan data-data yang akurat. Untuk hal tersebut ada tahapan *heuristik, kritik, interpretasi* dan *historiografi*. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif adalah metode yang berpangkal pada peristiwa-peristiwa sosial yang pada hakikatnya tidak bersifat eksak.²¹

1. Heuristik

Penelitian sejarah memerlukan tahapan-tahapan dalam penulisannya, salah satunya mengumpulkan dan mencari sumber-sumber yang terkait dengan tema pembahasan. Proses mencari dan menghimpun sumber-sumber data yang ada kaitannya atau erat hubungannya dengan masalah yang akan dibahas setelah dikumpulkan selanjutnya dipilah-pilah. Hal ini sangat diperlukan bagi peneliti sejarah, terutama tahapan heuristik. Menurut G. J Rener, heuristik memiliki arti suatu keterampilan dalam menemukan, kemudian menangani dan merinci bibliografi, mengklasifikasikan serta merawat catatan-catatan.²²

Setelah tahapan heuristik selesai maka tahapan selanjutnya dipilah kembali mana yang termasuk kedalam sumber primer dan juga sekunder. Sehingga sumber dalam sejarah bisa dibagi menjadi dua:

- a. Sumber Primer, yakni sumber yang berasal dari tangan pertama atau dari pelaku sejarah atau saksi dari peristiwa sejarah.
- b. Sumber Sekunder, yakni sumber yang sudah dianalisis (diolah) oleh orang setelahnya.²³

Dalam proses ini maka peneliti membagi sumber-sumber data dengan dua cara, diantara dengan menggunakan literatur pustaka buku yang dilakukan dengan mengunjungi beberapa perpustakaan, seperti perpustakaan Batu Api, Perpustakaan

²⁰ E Kosim, *Metode Sejarah*, (Bandung: Universitas Padjadjaran Fakultas Sastra Jurusan Sejarah, 1984), hlm 10.

²¹ E Kosim, *Metode Sejarah*, (Bandung: Universitas Padjadjaran Fakultas Sastra Jurusan Sejarah, 1984), hlm 10.

²² Dudung Abdurahman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm 55.

²³ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Bentang, 2005), hlm 95-98.

Lawang Bokoe, Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Perpustakaan Nasional, Arsip Nasional dan Perpustakaan PBNU.

Setelah semua data tersebut ditemukan, penulis mencoba mengumpulkan dalam dua kategori, yaitu sumber primer (sumber utama atau sejamin) dan juga sumber sekunder (sumber yang berkaitan dengan pembahasan), adapun sumber yang didapatkan diantaranya:

Sumber Primer

a. Dokumen

1. Majalah Api Islam, Idham Chalid, Haluan Politik Negara, No. 1 thn. 1 Juli 1965.
2. Majalah Api Islam, Idham Chalid, Haluan Politik Negara, No. 2 thn. 1 Juli 1965.
3. Majalah Api Islam, Idham Chalid, Haluan Politik Negara, No. 3 thn. 1 Juli 1965.
4. Majalah Api Islam, Idham Chalid, Haluan Politik Negara, No. 4 thn. 1 Agustus 1965.
5. Majalah Api Islam, Idham Chalid, Haluan Politik Negara, No. 5 thn. 1 Agustus 1965.
6. Majalah Api Islam, Idham Chalid, Haluan Politik Negara, No. 6 thn. 1 Agustus 1965.
7. Majalah Api Islam, Idham Chalid, Haluan Politik Negara, No. 7 thn. 1 Agustus 1965.
8. Majalah Api Islam, Idham Chalid, Haluan Politik Negara, No. 8 thn. 1 Juli 1965.
9. Majalah Api Islam, Idham Chalid, Haluan Politik Negara, No. 9 thn. 1 September 1965.

b. Buku

1. Islam dan Demokrasi Terpimpin, karya Idham Chalid, diterbitkan oleh Api Islam di Jakarta tahun 1965.
2. Mendajung Dalam Taufan, karya KH Idham Chalid, diterbitkan oleh Api Islam pada tahun 1966.

3. NULOGI yang merupakan kumpulan pidato KH Idham Chalid yang diterbitkan Presidium Wilayah Majelis Alumni IPNU pada tahun 2009.
4. Mukhtasor Dalail Khairot wal Manaqib KH Idham Chalid, karya KH Idham Chalid, diterbitkan oleh Darul Al-syakirin pada tahun 1992.
5. Manipol Usdek dalam Mata Peladjaran, diterbitkan oleh P.P Tjiptakarya di Jakarta pada tahun 1959.
6. Wedatama Kawedar Djilid I, ditulis oleh R. Sutjipto Brotohatmodjp, diterbitkan oleh GRIP di Surabaya pada tahun 1963.
7. Penetapan Bahan-bahan Indoktrinasi, diterbitkan oleh DUA-R di Bandung pada tahun 1947.
8. Guruku orang-orang dari Pesantren, karya KH Saifuddin Zuhri, diterbitkan oleh PT Al-Ma'arif di Bandung pada tahun 1974.
9. Berangkat dari Pesantren, karya KH Saifuddin Zuhri, diterbitkan oleh LKiS di Yogyakarta pada tahun 2013.
10. Kaidah Berpolitik dan Bernegara, karya KH Abadul Wahab Chasbullah, diterbitkan oleh Langgar Swadaya Nusantara di Depok cetakan kedua pada tahun 2015.
11. Mbah Wahab Hasbullah Kiai Nasionalis Pendiri NU, karya KH Saifuddin Zuhri, diterbitkan oleh Pustaka Pesantren di Yogyakarta pada tahun 2010.
12. Bung Karno Demokrasi Terpimpin Milik Rakyat Indonesia (Kumpulan Pidato) dihimpun oleh Wawan Tunggul Alam, diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama di Jakarta pada tahun 2001.

Sumber Sekunder

BUKU

1. Ijtihad Politik Ulama Sejarah NU 1952-1967 karya Greg Fealy, di terbitkan oleh LKiS di Yogyakarta pada tahun 2009.
2. Napak Tilas Pengabdian Idham Chalid Tanggung Jawab Politik NU dalam Sejarah karya Arif Mudatsir Mandan, diterbitkan oleh Pustaka Indonesia Satu di Jakarta pada tahun 2008.
3. Idham Chalid Guru Politik Orang NU karya Ahmad Muhajir, di terbitkan oleh LKiS di Yogyakarta pada tahun 2007.

4. Riwayat Hidup dan Perjuangan Prof. KH. Saifuddin Zuhri Ulama Pejuang Kemerdekaan, disusun oleh Lukman Hakim Saifuddin, Ali Zawawi, Zubairi Hasan dan Sahlul Fuad. Diterbitkan oleh Yayasan Saifuddin Zuhri di Jakarta pada tahun 2013.
5. NU dan Pancasila karya Einar Martahan Sitompul, diterbitkan oleh Pustaka Sinar Harapan di Jakarta pada tahun 1989.
6. NU vis-à-vis NEGARA karya Andree Feillard diterbitkan oleh LKiS di Yogyakarta pada tahun 1999.
7. Partai Islam di Pentas Nasional karya Deliar Noer, diterbitkan oleh Mizan di Bandung pada tahun 1987.
8. Antara Tradisi dan Konflik: Kepolitikan Nahdlatul Ulama karya Kang Young Soon diterbitkan oleh UI-Press di Jakarta pada tahun 2008.
9. Soekarno dan NU titik temu Nasionalisme karya Zainal Abidin Amir, diterbitkan oleh LKiS di Yogyakarta pada tahun 2013.
10. Ijtihad Kebangsaan Soekarno dan NU karya Imam Muhlis diterbitkan oleh CV Tangan Emas Publisher di Kebumen pada tahun 2013.
11. Konflik Elite PBNU Seputar Muktamar, ditulis oleh Chairul Anam diterbitkan di Jakarta oleh Duta Aksara Mulia Cetakan kedua tahun 2010.
12. Pertumbuhan dan Perkembangan NU karya Choirul Anam, diterbitkan oleh PT. Duta Aksara Mulia di Surabaya pada tahun 1985.
13. Piagam Perjuangan Kebangsaan karya Abdul Mun'in DZ, diterbitkan oleh Setjen PBNU-NU Online di Jakarta pada tahun 2011.
14. Soekarno-Militer dalam Demokrasi Terpimpin karya Herbert Feith, diterbitkan oleh Pustaka Sinar Harapan di Jakarta pada tahun 1995.
15. Demokrasi Liberal (1950-1959) dan Demokrasi Terpimpin (1959-1966) karya Sujarwanto Sucipto, diterbitkan oleh Derwati Press Pontianak Selatan Kalimantan Barat pada tahun 2018.

2. Kritik

Pada tahap kritik data kemudian diolah atau dianalisis, pengelolaan data atau analisis yaitu berupa kegiatan yang meneliti sumber-sumber yang setelah dihimpun melalui tahapan heuristik diuji melalui tahapan kritik ekstern dan intern, yaitu

merupakan kritik terhadap masalah otentitas pengelompokan atau klasifikasi sumber data.

a. Kritik Intern

Proses pengujian terhadap setiap sumber yang didapat, apakah sumber tersebut dapat dipercaya atau tidak merupakan sebuah tahapan dalam kritik intern. Dalam tahapan ini, sumber tertulis kemudian dibandingkan dari segi isi sumber tertulis tersebut. Apakah ada kaitannya dengan tema pembahasan. Ini berlaku untuk sumber-sumber tertulis, baik berupa dokumen maupun sumber tertulis lainnya. Kritik intern digunakan untuk mengetahui dan menyelesaikan tentang keotentikan sumber data dan disini pengkritikan sumber-sumber yang akan didapat. Sumber primer seperti dari dokumen dan sumber sekunder berupa buku-buku yang ada kaitannya dengan tema pembahasan.

Beberapa sumber yang peneliti peroleh kondisinya dalam keadaan baik dan masih bisa dibaca atau dapat dilihat dengan jelas. Selain sumber primer yang masih dalam keadaan baik, sumber sekunder yang berupa buku juga masih dalam keadaan baik dan utuh. Untuk masalah keaslian sumber baik primer juga sekunder. Sumber-sumber primer yang didapat berasal dari masa demokrasi terpimpin, artinya berasal dari zaman yang akan penulis teliti.

b. Kritik Ektern

Kritik intern adalah untuk mengetahui keotentikan suatu sumber termasuk menyelidiki bentuk sumber. Sementara kritik ekstern adalah untuk mengetahui kredibilitas sesuatu data. Dengan kritik yang tajam maka dapat dipercayai keberadaan dan ketelitiannya.

Kritik ekstern digunakan untuk menyelesaikan tentang kredibilitas data atau kebenaran sebuah fakta sejarah. Penulis menelusuri dari kajian pustaka salah satunya buku-buku yang memiliki kaitan dengan dukungan politik NU terhadap kepemimpinan Soekarno. Setelah dianalisis buku-buku maupun dokumen yang tersedia dari segi kelayakan dan juga isi dirasa baik dan juga memenuhi kriteria sebagai sumber.

Kritik ekstern yang dilakukan pada sumber primer berupa sumber tertulis dari dokumen-dokumen, diantaranya sebagai berikut:

1) Sumber Buku

Dari semua sumber buku yang peneliti dapat, keadaannya sangat baik dan didalam pembahasan buku memiliki beberapa pembahasan yang sesuai dengan apa yang akan peneliti bahas seperti pada buku Islam dan Demokrasi Terpimpin yang ditulis oleh KH Idham Chalid pada tahun 1965.

Buku Islam dan Demokrasi Terpimpin karya KH Idham Chalid di terbitkan oleh Api Islam di Jakarta tahun 1965. Buku ini merupakan buku kumpulan materi yang pernah dikuliahkan didepan para mahasiswa Perguruan Tinggi Islam Nahdlatul Ulama di Surakarta. Sumber ini merupakan sumber yang dipercaya atau kredibel karena isi dari buku ini memberikan informasi mengenai pemikiran KH Idham Chalid tentang demokrasi terpimpin dari sudut pandang Islam yang merupakan landasan KH Idham Chalid dan NU menerima konsep demokrasi terpimpinya Presiden Soekarno.

Didalam buku tersebut KH Idham Chalid memaparkan bahwa konsep demokrasi terpimpin sesuai dengan ajaran Islam yaitu *syuro* atau musyawarah. Dukungan gagasan KH Idham Chalid ini yang merupakan suara dari NU sendiri juga bisa dilihat pada Majalah Api Islam yang diberi judul Haluan Politik Negara yang ditulis langsung oleh KH Idham Chalid.

Buku Mendajung dalam Taufan karya KH Idham Chalid adalah naskah pidato keagamaan KH Idham Chalid dalam acara-acara resmi Nahdlatul Ulama yang diterbitkan pada tahun 1966. Buku ini juga menjadi sikap resmi PBNU dalam menyikapi konsep demokrasi terpimpin presiden Soekarno. Buku NULOGI juga adalah kumpulan pidato KH Idham Chalid, namun buku ini tidak dijadikan sikap resmi PBNU terkait demokrasi terpimpin, walaupun begitu buku ini tetap masih bisa dijadikan sumber primer untuk melihat corak pemikiran KH Idham Chalid dalam isi pidato-pidatonya.

Buku Mukhtasor Dalail Khairot wal Manaqib KH Idham Chalid, karya KH Idham Chalid yang diterbitkan oleh Darul Al-syakirin pada tahun 1992 adalah buku yang berisi manaqib atau biografi KH Idham Chalid dan memuat ringkasan bacaan Dalail Khoirot yang menjadi amalan sehari-hari KH Idham Chalid, ringkasan atau Muktasor ini adalah ringkasan yang ditulis dan sering diijazahkan oleh KH Idham

Chalid. Buku ini bisa dijadikan sumber primer untuk melihat biografi dari ketua umum PBNU tersebut.

Buku yang berjudul Manipol Usdek dalam Mata Peladjaran, diterbitkan oleh P.P Tjiptakarya di Jakarta pada tahun 1959 yang disusun oleh Sibagyo, Sakti Slamet dan Hendra merupakan buku yang berisi konsep Nasakom dan Manipol-Usdek Presiden Soekarno pada masa awal penerapan demokrasi terpimpin di Indonesia. Buku ini berisi enam bab mulai dari sendi, asas dan tujuan revolusi Indonesia, periode-periode revolusi Indonesia, dekrit Presiden 5 Juli 1959, lahirnya manifesto politik, USDEK dan badan-badan baru ketatanegaraan, buku ini juga berisi lampiran-lampiran keputusan Dewan Pertimbangan Agung tentang perintisan Manifesto Politik Republik Indonesia pada 17 Agustus 1959.

Buku Wedatama Kawedar Djilid I yang ditulis oleh R. Sutjipto Brotohatmodjo diterbitkan oleh GRIP di Surabaya pada tahun 1963. Buku ini bersisi Serat Weda Tama merupakan hasil karya raja dan pujangga besar Mangkunegara ke-IV yang memuat kepribadian khas Indonesia, karena salah satu unsur dari Manipol-Usdek adalah kepribadian nasional.

Buku Penetapan Bahan-bahan Indoktrinasi, diterbitkan oleh DUA-R di Bandung pada tahun 1947. Buku ini berisi pidato Presiden Soekarno yang berisi lahirnya Pancasila, UUD 1945 beserta penjelasannya, Manipol beserta perinciannya dari DPA, Pidato Presiden Soekarno pada 17 Agustus 1960 beserta perinciannya dari DPA, Pidato Presiden Soekarno di muka sidang Perserikaran Bangsa Bangsa (PBB) tanggal 30 September 1960 beserta perinciannya dari DPA, Penjelasan Manipol dan Usdek, dan amanat pembangunan Presiden pada sidang Depernas 28 Agustus 1959.

Buku Guruku orang-orang dari Pesantren karya KH Saifuddin Zuhri yang diterbitkan oleh PT Al-Ma'arif di Bandung pada tahun 1974 adalah buku biografi KH Saifuddin Zuhri yang berisi perjalanan hidup beliau. Ia adalah tokoh NU khususnya pada masa demokrasi terpimpin, oleh karena itu buku ini termasuk buku primer dan layak dijadikan sumber. Juga buku yang berjudul Berangkat dari Pesantren, karya KH Saifuddin Zuhri yang diterbitkan oleh LKiS di Yogyakarta pada tahun 2013. Buku tersebut semacam memoar berisi perjalanan KH Saifuddin

Zuhri dalam pengabdianya. Hemat penulis bahwa buku ini termasuk dalam sumber primer. Juga buku berjudul Mbah Wahab Hasbullah Kiai Nasionalis Pendiri NU, karya KH Saifuddin Zuhri diterbitkan oleh Pustaka Pesantren di Yogyakarta pada tahun 2010. Berisi mengenai sejarah perjuangan KH Wahab Chasbullah, beliau menyaksikan sendiri perjuangan seorang Ra'is Am PBNU tersebut karena sama-sama berjuang di NU pada masa-masa sulit.

Buku dengan judul Kaidah Berpolitik dan Bernegara, karya KH Abdul Wahab Chasbullah, diterbitkan oleh Langgar Swadaya Nusantara di Depok cetakan kedua pada tahun 2015. Buku ini adalah kumpulan tulisan dan ceramah KH Abdul Wahab Chasbullah yang banyak terjadi pada masa demokrasi terpimpin, karena memang sosok KH Abdul Wahab Chasbullah adalah tokoh kunci politik NU pada masa tersebut.

Buku dengan judul Bung Karno Demokrasi Terpimpin Milik Rakyat Indonesia, adalah kumpulan pidato Presiden Soekarno yang didalamnya juga terdapat pidato Penemuan Kembali Revolusi Kita yang menjadi dasar dari Haluan Politik Negara masa demokrasi terpimpin. Buku ini dihimpun oleh Wawan Tunggal Alam, diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama di Jakarta pada tahun 2001.

Semua buku diatas kondisinya sangat baik dan juga bisa dibaca sehingga memudahkan bagi peneliti untuk melihat tulisannya secara jelas, apalagi tinta yang digunakan juga masih tergolong bagus, sehingga peneliti tidak kesulitan untuk memahami apa yang disampaikan pada isi buku.

2) Sumber Dokumen

Majalah Api Islam tahun 1965 adalah majalah yang didirikan oleh KH Idham Chalid dan KH Saifuddin Zuhri, didalam majalah tersebut terdapat tulisan KH Idham Chalid yang bersambung setiap edisinya dengan judul Haluan Politik Negara dari nomor dua sampai nomor sembilan diterbitkan pada bulan Juli sampai bulan September tahun 1965. Majalah ini digunakan sebagai alat propaganda atau usaha penyebaran gagasan-gagasan Presiden Soekarno pada kalangan Muslim Tradisional mengenai konsep demokrasi terpimpin yang sesuai dengan ajaran Islam. Sumber ini merupakan sumber yang dapat dipercaya atau kredibel karena

memuat aktifitas dan pemikirannya KH Idham Chalid selaku ketua PBNU pada masa demokrasi terpimpin khususnya pada tahun 1965.

3. Interpretasi

Dalam tahapan ini kegiatan mentafsirkan fakta-fakta serta menerapkan makna yang saling kolerasi atau berhubungan dari fakta-fakta yang diperoleh. Dengan kata lain sumber informasi yang diperoleh dari sumber-sumber yang dikritik dapat terkonstruksi dengan baik. Pada tahapan ini penulis merangkai data yang telah diselesaikan menjadi keseluruhan yang harmoni dan logis, suatu data yang dibiarkan berdiri sendiri atau sejumlah fakta yang bersangkutan secara kronologis merupakan sebuah kisah sejarah. Setelah mendapatkan dan mengkritik sumber seperti yang telah dipaparkan diatas, penulis merangkainya untuk mengkisahkan peristiwa-peristiwa dan kajian yang akan dilakukan untuk melengkapi tulisan (historiografi) yang akan dipaparkan. Dengan begitu penulis mampu untuk menuliskan secara komunikatif, sehingga sangat mudah untuk dibaca.

Dalam menginterpretasikan setiap data yang diperoleh diperlukan pendalaman pemahaman terhadap objek yang diteliti. Begitu pula yang peneliti lakukan saat ini. Objek kajian yang peneliti kaji ini mengenai “*Dukungan Nahdlatul Ulama terhadap Kepemimpinan Soekarno tahun 1959-1965*”. Peneliti memberikan batasan waktu sejak tahun 1959 sebagai masa awal penerapan konsep demokrasi terpimpin di Indonesia sampai tahun 1965 yang merupakan masa akhir dari konsep demokrasi terpimpin dan diganti dengan demokrasi Pancasila pada tahun 1966.

4. Historiografi

Sebuah karya ilmiah dibuat dengan sistematis dan konsisten. Ini diperlukan bagi peneliti dan diperlukan pembahasan secara sistematis dan kronologis untuk itu perlunya pengelompokan dalam beberapa bab. Semua ini diperlukan untuk memudahkan pemahaman bagi sang pembaca. Pembahasan tesis ini akan dibagi menjadi lima bab yang disusun secara kronologis dan saling berkaitan.

BAB I PENDAHULUAN, yang terdiri dari latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis dan metode penelitian. Isi pokok bab ini merupakan gambaran seluruh penelitian secara garis

besar, sedangkan deskripsi secara terperinci akan diuraikan dalam beberapa bab berikutnya.

BAB II KONDISI NU DAN DEMOKRASI TERPIMPIN, yang mencakup latar belakang berdirinya demokrasi terpimpin di Indonesia, pelaksanaan demokrasi terpimpin, respon partai Islam dan NU kepada demokrasi terpimpin, NU masa demokrasi terpimpin, strategi NU di demokrasi terpimpin dan langkah NU dalam menghadapi demokrasi terpimpin.

BAB III ALASAN NU MENERIMA DEMOKRASI TERPIMPIN (1959-1965), membahas mengenai alasan ideologis, alasan teologis NU menerima demokrasi terpimpin, alasan sosilogis NU menerima demokrasi terpimpin, dan alasan politis NU menerima demokrasi terpimpin.

BAB IV DUKUNGAN NAHDLATUL ULAMA TERHADAP KEPEMIMPINAN SOEKARNO (1959-1965), pada bab ini membahas dukungan moral NU terhadap Presiden Soekarno, Dukungan ide NU terhadap konsep demokrasi terpimpin, Nasakom dan Manipol/USDEK, dukungan politik NU terhadap kepemimpinan Presiden Soekarno masa demokrasi terpimpin (1959-1965) dan hakikat dukungan-dukungan NU terhadap Presiden Soekarno masa demokrasi terpimpin (1959-1965).

BAB V PENUTUP, merupakan penutup yang berisi tentang simpulan dari hasil pembahasan secara keseluruhan, disertai dengan lampiran.

OUTLINE

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang Masalah
- 1.2 Rumusan Masalah
- 1.3 Tujuan Penelitian
- 1.4 Mamfaat Penelitian
- 1.5 Kajian Pustaka
- 1.6 Landasan Teori
- 1.7 Metode Penelitian

BAB II KONDISI NAHDLATUL ULAMA DAN DEMOKRASI TERPIMPIN

- 2.1 Latar Belakang Demokrasi Terpimpin
- 2.2 Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin
- 2.3 Respon Partai Islam Indonesia terhadap Demokrasi Terpimpin
- 2.4 Respon NU terhadap Demokrasi Terpimpin
- 2.5 NU masa Demokrasi Terpimpin
- 2.6 Strategi NU di Demokrasi Terpimpin
- 2.7 Langkah NU dalam Demokrasi Terpimpin

BAB III ALASAN NAHDLATUL ULAMA MENERIMA DEMOKRASI TERPIMPIN (1959-1965)

- 3.1 Alasan Ideologis NU Menerima Demokrasi Terpimpin
- 3.2 Alasan Teologis NU Menerima Demokrasi Terpimpin
- 3.3 Alasan Sosiologis NU Menerima Demokrasi Terpimpin
- 3.4 Alasan Politis NU Menerima Demokrasi Terpimpin

BAB IV DUKUNGAN NAHDLATUL ULAMA TERHADAP KEPEMIMPINAN PRESIDEN SOEKARNO (1959-1965)

- 4.1 Dukungan Moral NU terhadap Presiden Soekarno
- 4.2 Dukungan Ide NU terhadap Konsep Nasakom dan Manipol/Usdek
- 4.3 Dukungan Politik NU terhadap Kepemimpinan Presiden Soekarno Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
- 4.4 Hakikat Dukungan NU terhadap Presiden Soekarno Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

BAB V SIMPULAN

- 5.1 Simpulan
- 5.2 Saran

DAFTAR SUMBER

LAMPIRAN